

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Asyhadie, Zaeny, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2010, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting, Elyta Ras, 2018, *Hukum Kepailitan Rapat-Rapat Kreditur*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanintijo, Soemitro Ronny, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hartini, Rahayu, 2007, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Otto, Jan Michiel, 2003, “Reele Rechtszekerheidin Ontwikkelingslanden”, Terjemahan Tristam Moeliono, Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang, Cetakan Pertama, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN-RI)
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sastrawidjaja, Man S., 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2018, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahmi UndangUndang No. 37 Tahun 2004 Tentang Penundaan Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subhan, M. Hadi, 2009, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan edisi 2*, Sofmedia, Jakarta.

Syahrini, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.

Weber, Max 1905, *Die Protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus*, diterjemahkan oleh Talcott Parsons, 2003, *The Protestant Ethic and the spirit of Capitalism*, New York, Dover Publications

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

Ayu, Rindy, 2015 , “*Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, Jurnal Reportorium Kenotariatan Fakultas Hukum Undip, Vol.8 No. 2, September, 2015.

D. Karya Ilmiah

Hoft, Ph. Visser’t, 2001, *Penemuan Hukum, judul asli Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, Bandung.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 5 Maret 2020

Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Agustus 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 667/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 8 Juni 2021

F. Internet

Arsyadshawir, “Jenis-Jenis Kreditor dalam Kepailitan”. (<http://arsyhadshawir.blogspot.Com/2011/11/jenis-jenis-kreditor-dalam-kepailitan.html?m=1>), diakses 21 November 2020.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. Hak Rakyat Saat Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/hak-rakyat-saat-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/>.Diakses pada 1 Oktober 2021 pukul 13.15 WIB.

Dwika “*Keadilan dari dimensi sistem Hukum*” (02/04/2011) diakses pada 5 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB